

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN  
DAERAH, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SUMBER  
DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
(Studi Empiris Pada Satuan Kerja perangkat Daerah Kota Dumai)**

**Oleh :**

**Siti Hajar**

**Pembimbing : Yusralaini dan Lila Anggaraini**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

*E-mail : [hajarsitie22@yahoo.com](mailto:hajarsitie22@yahoo.com)*

*Effect Of The Implementation Of Financial Accounting System,  
Government Internal Control System, and Competence  
Human Resources Of The Effectiveness  
Of Financial Management Area  
(Empirical Study In Regional Working Unit Of Dumai City)*

**ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the effect of the implementation of financial accounting system, government internal control system, and competence human resources of the effectiveness of financial management area in Dumai City. The sampling method used in this study is nonprobability sampling method. Respondent of this study is head of departement, chief financial officer, and treasurer of departement. The sample used of this study were 102 respondents. Data analyzed in this study is multiple linear regression analysis with SPSS. The result shows that: 1) the implementation of financial accounting system area have positive effect on the effectiveness of financial management area with  $t_{hitung} (6,476) > t_{tabel} (1,984)$  and significance  $(0000) > 0.05$ , 2) government internal control system have positive effect on the effectiveness of financial management area with  $t_{hitung} (5,733) > t_{tabel} (1,984)$  and significance  $(0000) > 0.05$ , 3) human resources competence have positive effect on the effectiveness of financial management area with  $t_{hitung} (3,385) > t_{tabel} (1,984)$  and significance  $(0001) < 0.05$ . The magnitude of effect ( $R^2$ ) the implementation of financial accounting system, government internal control system, and competence human resources of the effectiveness of financial management area was 82.5%.*

*Keywords : system, competence, human resources, financial management, goverment and effectiveness*

**PENDAHULUAN**

Dasar pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dimana peraturan ini mendefinisikan

pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan adanya peraturan ini maka pemerintah daerah mempunyai landasan dan pedoman dalam mengelola keuangan daerah yaitu pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel maka setiap kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik tercermin dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Karena didalam laporan realisasi anggaran tersebut terlihat jelas seberapa besar penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun tersebut, dan seberapa besar persentase realisasi APBD dari yang telah dianggarkan. Faktanya, persentase penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih kurang dari 100% . Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum maksimal ataupun belum efektif.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Dumai tahun 2014, diuraikan bahwa anggaran Belanja Hibah yang dianggarkan sebesar hanya terealisasi sebesar Rp 66,85%. Dan Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan sebesar hanya terealisasi sebesar 9,50%. Rendahnya

penyerapan APBD mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum berjalan dengan efektif karena pemerintah Kota Dumai gagal dalam mencapai target yang telah ditetapkan (Anonim, 2014).

Dari Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015 milik salah satu SKPD di Kota Dumai, menggambarkan bahwa penyerapan dana APBD Tahun Anggaran 2013 masih kurang maksimal. Dana APBD yang terserap berkisar dibawah angka 68%. Adapun dana APBD yang diperuntukkan untuk Program Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Jumlah anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini realisasi penyerapan anggarannya sebesar hanya 67,15%. Kemudian untuk pelaksanaan Program *In House Training* Aparatur Pengawasan anggaran yang tersedia realisasinya hanya sebesar 68,13 %. (Anonim, 2015).

Untuk mengelola keuangan secara efektif diperlukan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, penataan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Apabila sistem akuntansi keuangan daerah diterapkan dengan baik pada setiap SKPD yaitu sesuai dengan prosedur yang berlaku maka hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain sistem akuntansi keuangan daerah, dalam meningkatkan efektivitas

pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah serangkaian prosedur yang dilakukan oleh kepala/pimpinan instansi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apabila sistem pengendalian internal pemerintah diterapkan dengan baik maka hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Simanungkalit (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang baik maka akan dibarengi oleh peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan apabila sistem pengendalian internal pemerintah daerah diterapkan dengan baik maka hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Disamping itu, faktor lain yang juga dianggap berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Mangkunegara (2005), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya. Apabila sumber daya manusia tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang pekerjaannya dan ditunjang oleh karakteristik kepribadian yang baik, maka hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Iskandar (2015) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Apabila suatu instansi memiliki sumber daya yang kompeten dibidang pekerjaannya, maka hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Yaswat (2015) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi penelitian dimana sebelumnya berlokasi di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan penelitian ini berlokasi di Kota Dumai.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah? 2) Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah? 2) Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?

Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut: 1) Untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, 2) Untuk menguji pengaruh sistem

pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, 3) Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## **TINJAUAN DAFTAR PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan menurut Halim (2012) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berkenaan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

### **Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Halim (2004) menyebutkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya dan didalam batas anggaran yang tersedia, dapat pula berarti pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. (Halim,2004). Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan adalah (1) penyelesaian kegiatan tepat waktu, (2) penyelesaian kegiatan dalam batas anggaran yang tersedia, (3) pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.

### **Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Berdasarkan Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengeumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Menurut Pradita (2010) menyebutkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator:

1. Sistem Pencatatan
2. Pengakuan Akuntansi
3. Pelaporan

### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta

didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalitas dalam bidang tertentu sebagai sesuatu yang penting, sebagai unggulan dibidang tersebut (Wibowo, 2007).

Menurut Nurjannah (2014) kompetensi sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator:

1. Pengetahuan
2. Kemampuan
3. Perilaku Individu

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari prosedur-prosedur yang harus dipatuhi oleh pihak pengelola keuangan yang ada didalam suatu instansi. Sistem ini terdiri dari beberapa proses yaitu pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan. Pengelola keuangan yang ada didalam instansi dituntut untuk menjalankan prosedur ini sesuai ketentuannya. Ini berarti, secara tidak langsung sistem akuntansi keuangan daerah ini menuntut pengelola keuangan untuk taat kepada prosedur yang ada. Apabila prosedur-prosedur ini dijalankan sesuai ketentuan yang telah diatur maka penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan menghasilkan informasi keuangan yang baik, cermat dan transparan. Hal ini akan dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Yaswat (2015) menyimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan semakin baik penerapan sistem akuntansi suatu instansi maka semakin tinggi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>1</sub>: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

#### **Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan entitas sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan daerah/negara. Apabila sistem pengendalian internal pemerintah berjalan sesuai dengan semestinya dan berjalan sesuai yang diharapkan maka sistem pengendalian internal pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Suprayogi (2010) menunjukkan

bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa apabila sistem internal pemerintah diterapkan dengan baik maka hal ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>2</sub>: Sistem internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerjanya (Mangkunegara, 2005:40). Sumber daya mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Karena didalam suatu instansi sumber daya yang menjalankan dan menggerakkan suatu instansi tersebut. Oleh karena itu, sumber daya yang bekerja di instansi tersebut haruslah mempunyai kompetensi. Artinya, sumber daya tersebut harus memiliki pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu yang baik dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Sumber daya manusia suatu instansi harus mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan mempunyai kemampuan berkomunikasi secara

lisan maupun tulisan serta memiliki perilaku individu yaitu memiliki kreativitas dalam bekerja, adanya semangat kerja yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Iskandar (2015) menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini membuktikan bahwa semakin berkompeten sumber daya manusia suatu instansi maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah.

H<sub>3</sub>: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Dumai. Adapun teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau biasa dikenal dengan sensus. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Responden pada penelitian ini adalah Kepala SKPD, Kepala Subbagian Keuangan, dan bendahara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 102 responden dari 34 SKPD.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dengan cara memberikan kuisioner kepada responden terkait dengan pengelolaan keuangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan diantaranya adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan koefisien

determinasi dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS.

### **Analisis Regresi Berganda**

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu variabel atau lebih (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

### **Pengujian Data**

#### **Uji Validitas Data**

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian haruslah valid, yaitu kuisioner yang mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk/variabel.

Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan analisis *corrected item-total correlation*. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan valid apabila memenuhi kriteria jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka dinyatakan valid sedangkan jika  $r$  hitung  $<$  tabel, maka dinyatakan tidak valid.

#### **Uji Reliabilitas**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan. Tujuan dari pengujian ini adalah seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Metode reliabilitas yang sering digunakan adalah

metode *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Semakin besar koefisien nilai alpha akan semakin reliabel data tersebut. pengujian alpha akan dilakukan pada tiap bagian variabel independen dan variabel dependen (Nugroho, 2011:28).

#### **Uji Normalitas**

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013:147). Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan statistik *Kolmogorov Smirnov*. Alat uji ini biasa disebut K-S yang tersedia pada Program SPSS For Windows. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dalam tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila  $\text{sig} > 0,05$ .

#### **Pengujian Asumsi Klasik**

##### **Uji Multikolonieritas**

Uji ini bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya model korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2013:105). Uji ini dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor*

(VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan model regresi bebas gejala multikolonieritas.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat Grafik plot. Dasar pengambilan keputusannya jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:139).

### Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan Uji *Durbin-Watson (DW test)*.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R_2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adjusted  $R_2$  berarti  $R_2$  sudah disesuaikan dengan derajat bebas masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup didalam perhitungan

Adjusted  $R_2$ . Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ( $0 \leq R_2 \leq 1$ ). Ini berarti jika  $R_2 = 0$  menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, dan jika  $R_2$  semakin besar mendekati 1, maka menunjukkan semakin kuat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:98).

### Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis secara parsial digunakan uji statistik t. Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013:98). Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen, maka dibandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel serta membandingkan nilai signifikan t dengan *level of significant* ( $\alpha$ ). Nilai dari *level of significant* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t kecil dari 0,05, maka  $H_0$  ditolak. Bila  $H_0$  ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Dumai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di kota tersebut. Kota Dumai merupakan kota yang terletak di Provinsi Riau

yang merupakan Kota terluas di Indonesia..

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan gambaran mengenai variabel-variabel pada penelitian ini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang ditunjukkan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Mean	Standar Deviasi
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	102	42.09 80	6.39386
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	102	57.82 35	9.37810
Kompetensi Sumber Daya Manusia	102	34.54 90	5.17731
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	102	49.63 73	6.86762
Valid N (listwise)	102		

**Sumber :** Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari keempat variabel tersebut lebih besar dari nilai standar deviasinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pada penelitian ini sudah baik.

### Hasil Uji Validitas Data

Berdasarkan hasil pengujian validitas data menggunakan nilai *Correlated Item – Total Correlation* dengan bantuan program komputer

SPSS, diperoleh nilai r hitung lebih besar dibandingkan nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0.1946 diperoleh dari tabel r dimana  $df = 102-2 = 100$  dengan tingkat signifikansi = 5%. Nilai r hitung sebesar 0.1946 lebih besar dibandingkan r hitung yang diperoleh pada penelitian ini membuktikan bahwa data pada pada penelitian ini adalah valid.

### Hasil Uji Reliabilitas

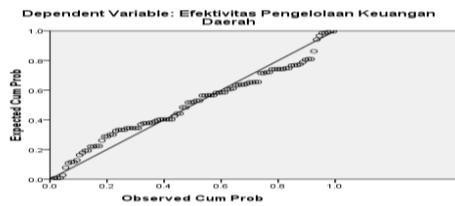
Teknik yang digunakan untuk mengukur tingkat reliabilitas adalah dengan menggunakan *cronbach's alpha* dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan standar reliabilitasnya. Data tersebut dapat dikatakan reliabel apabila memiliki nilai  $> 0.060$  (besar dari 0.060). *Cronbach's alpha* dapat diketahui dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu dengan menggunakan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diketahui bahwa keseluruhan instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dinyatakan reliabel, hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's alpha* yang diteliti lebih besar dari standarnya (0.06).

### Hasil Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas data pada penelitian ini dapat dilihat dari gambar *Normal Probability Plot*. Jika data berdistribusi normal maka pola titik-titik pada gambar akan mengikuti garis diagonal. Berikut ini merupakan gambar *Normal Probability Plot* yang ditunjukkan pada gambar 1 sebagai berikut :

**Gambar 1**  
*Normal Probability Plot*



**Sumber :** *Data Olahan, 2016*

Berdasarkan gambar 1 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Hasil Uji Multikolonieritas**

Berikut ini adalah tabel hasil uji multikolonieritas pada penelitian ini yang ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.580	1.725
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.319	3.130
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.296	3.374

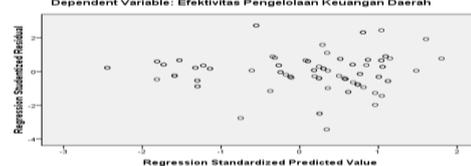
**Sumber :** *Data Olahan, 2016*

Berdasarkan tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa hasil uji multikolonieritas seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* <0.10 dan nilai *VIF* > 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dari pengaruh multikolonieritas.

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini yang ditunjukkan pada gambar 2 sebagai berikut :

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



**Sumber :** *Data Olahan, 2016*

Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu, dan menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

**Hasil Uji Autokorelasi**

Berikut ini adalah tabel hasil uji autokolerasi pada penelitian ini yang terdapat pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Variabel Independen	Durbin-Watson	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	2.019	Bebas Autokorelasi
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (X2)		
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)		

**Sumber :** *Data Olahan, 2016*

Berdasarkan tabel 3 diatas, nilai *Durbin Watson* untuk variabel independen menunjukkan nilai 2.019. Dari tabel *Durbin Waston* dengan  $\alpha = 5\%$  ;  $n = 102$  ;  $(k - 3)$  , didapat nilai  $dU = 1.7383$ . Dari nilai

dU tersebut diperoleh nilai  $(4 - dU) = 4 - 1.7383 = 2.2617$ . Dari nilai tersebut diketahui bahwa nilai Durbin Waston 2.019 lebih besar dari 1.7383 dan lebih kecil dari 2.2617. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

### Hasil Analisis Regresi Berganda

Berikut ini adalah hasil analisis regresi berganda yang ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Regresi berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Std. Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	4.321	2.158	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.386	.060	.360
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.294	.055	.402
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.349	.103	.263

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel 4 diatas, maka dapat ditentukan hasil persamaan regresi pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = 4.321 + 0.386 + 0.294 + 0.349 + e$$

Keterangan:

X1: Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

X2: Sistem pengendalian internal pemerintah

X3: Kompetensi sumber daya manusia

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berikut ini adalah tabel hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini yang ditunjukkan pada tabel 5 sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 <sup>a</sup>	.825	.820	2.91724

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel 5 diatas, diperoleh nilai R sebesar 0.908 atau 90.8%. Sedangkan nilai R Square sebesar 0.825 atau 82.5%. Ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Dumai dapat dipengaruhi oleh faktor penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 82.5%. Sedangkan sisanya sebesar 17.5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan didalam penelitian ini.

### Hasil Uji Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan secara parsial. Artinya penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat (Ghozali, 2013:98).

Untuk nilai  $t_{tabel}$  pada penelitian ini adalah  $t_{tabel} = n - k - 1 = 102 - 3 - 1 = 98$  dengan nilai  $\alpha = 0.05$  maka diketahui nilai  $t_{tabel} = 1.984$ . Dimana n adalah jumlah sampel,  $(k - 1) =$  jumlah variabel bebas - 1.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial**

Model	Std. Coefficients		
	Beta	T	Sig.
1 (Constant)		2.002	.048
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.360	6.478	.000
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.402	5.373	.000
Kompetensi Sumber Daya Manusia	.263	3.385	.001

Sumber : Data Olahan, 2016

**Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = 6.476$  dengan signifikansi 0.000 dan diperoleh nilai  $t_{tabel} = 1.984$ . Maka diketahui bahwa  $t_{hitung} (6.476) > t_{tabel} (1.984)$  dan  $Sig (0.000) < 0.05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Adanya koefisien  $\beta$  sebesar 0.386 menyatakan bahwa adanya pengaruh positif sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka semakin tinggi efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sebuah prosedur yang harus dilaksanakan pihak pengelola keuangan suatu instansi yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan hingga menghasilkan sebuah laporan keuangan yang lengkap, cermat dan dapat dipercaya. Apabila prosedur yang telah diatur tersebut telah dijalankan sesuai dengan semestinya, maka hal tersebut akan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Yaswat (2015), Pradita (2010) dan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

**Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} = 5.373$  dengan signifikansi 0.000 dan diperoleh nilai  $t_{tabel} = 1.984$ . Maka diketahui bahwa  $t_{hitung} (5.733) > t_{tabel} (1.984)$  dan  $Sig (0.000) < 0.05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya koefisien  $\beta$  sebesar 0.294 menyatakan adanya pengaruh positif

dari sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan sebuah upaya yang menyeluruh yang harus dilakukan oleh kepala daerah maupun pimpinan instansi dalam memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Usaha tersebut terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, hingga pemantauan. Apabila kelima unsur tersebut dijalankan dan diterapkan oleh pimpinan instansi dengan baik dan para pegawai ikut berperan dalam pengendalian internal ini maka hal ini akan dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Nurjannah (2014) dan Iskandar (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini diterima. Hasil menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan tabel 6 diatas, terlihat bahwa nilai  $t_{hitung} = 3.385$  dengan signifikansi 0.001 dan diperoleh nilai  $t_{tabel} = 1.984$ . Maka diketahui bahwa  $t_{hitung} (3.385) > t_{tabel}$

(1.984) dan  $Sig (0.001) < 0.05$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya koefisien  $\beta$  sebesar 0.349 menyatakan adanya pengaruh positif dari kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan, pengetahuan dan perilaku individu yang dapat menunjang pekerjaan para sumber daya manusia tersebut. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang besar dalam membantu mencapai tujuan organisasi. Apabila sumber daya manusia mempunyai kompetensi yang baik dalam menjalankan pekerjaannya maka hal tersebut dapat membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Baik dan buruknya pengelolaan keuangan daerah suatu pemerintah tergantung kepada sumber daya yang ada didalamnya. Hal ini disebabkan sumber daya manusia didalamnya berfungsi sebagai penggerak dalam rangka menjalankan tujuan organisasi.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2015) dan Nurjannah (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin berkompeten sumber daya manusia maka semakin baik pula efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Dumai), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai. Semakin baik penerapan sistem akuntansi maka akan semakin efektif pengelolaan keuangan daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai. Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka akan semakin efektif pengelolaan keuangan daerah.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai. Semakin berkompeten sumber daya yang ada dalam instansi tersebut maka semakin efektif pula pengelolaan keuangannya.

### Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap efektivitas pengelolaan

keuangan daerah, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan wawancara yang mungkin dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Untuk penelitian selanjutnya, perlu menambahkan variabel independen, moderating atau intervening untuk melihat pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, seperti pengawasan fungsional ataupun pengawasan melekat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2014. *Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014*: Pemerintah Kota Dumai, [www.dumaikota.go.id](http://www.dumaikota.go.id), 21 September 2019
- Anonim, 2015. *Rencana Kerja milik satu SKPD Kota Dumai Tahun 2015*: Pemerintah Kota Dumai, [www.dumaikota.go.id](http://www.dumaikota.go.id), 8 Mei 2016
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate Dengan Program IBM SPSS*, Cetakan Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : UUP AMP YPKN.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

- Iskandar, Joni. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*. *Skripsi Universitas Pasundan*.
- Pradita, Gilang. 2010. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. *Skripsi Universitas Widyatama*.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Sumber Daya Manusia Perusahaan.. Bandung : Remaja Rosdakarya*
- Nurjannah, Siti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Daerah Kota Baubau. *Skripsi Universitas Hasannudin*.
- Simanungkalit, Anggelina. 2013. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi Universitas Gorontalo..*
- Suprayogi, Angga. 2010. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung*.
- Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Yaswat, Latifatul. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Jom Fekon Vol. No.2*.